

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dikatakan sebagai sebuah usaha berkelanjutan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, bangsa serta negara dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional juga harus menjadi cara untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana yang disebutkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, salah satu prioritas Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini prioritasnya diwujudkan dengan tahap perencanaan pembangunan yang terorganisir, komprehensif dan berjangka panjang (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Pembangunan nasional difokuskan untuk rakyat, dari berbagai aspek kehidupan bangsa dari segi ranah politik pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ekonomi. Dengan cerminan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara lahir juga batin, yang memiliki rasa aman, tenteram dan adil yang berkelanjutan serta kebebasan untuk dapat mengutarakan pendapat yang bertanggungjawab untuk semua rakyat. Dalam arti bahwasannya pembangunan nasional dilakukan bersama oleh pemerintah dengan menggandeng rakyat.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dinilai berdasarkan indikator yang ada. Pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran menjadi penilaian kunci atas keberhasilan pembangunan negara. Di Indonesia, pembangunan nasional masih menjadi masalah dalam pemerataan suatu daerah.

Berdasarkan Jogaswara (2020), proses pembangunan di Indonesia terhambat karena sektor lapangan kerja masih dihadapkan pada tingkat

pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari situs (bps.go.id) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, pengangguran pada Indonesia tembus angka 8,40 juta orang. Dalam hal ini dampak dari pengangguran di Indonesia mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga pengangguran dapat dikatakan tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat tidak maksimum untuk dapat dicapai. Berdasarkan data yang diambil dari situs (bps.go.id) Badan Pusat Statistik (BPS), Pada bulan Maret 2023, populasi orang miskin di wilayah desa mencapai 14,16 juta jiwa. Dengan memprioritaskan desa sebagai fokus pembangunan, terbuka lebih banyak peluang menurunkan angka kesenjangan pendapatan, kesenjangan diantara yang kaya dan miskin, dan juga kesenjangan antara desa dan kota (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Desa dikatakan sebagai unit administrasi terkecil di mana pemerintah Indonesia berhubungan langsung dengan warga. Salah satu tujuan pemerintah dengan mengembangkan kawasan desa untuk memberdayakan masyarakat sebagai bentuk meningkatkan produktivitas serta keragaman usaha di desa, dan memfasilitasi sarana serta prasarana sebagai bentuk dukungan partisipasi perekonomian desa, selain itu juga menciptakan serta memperkuat kelembagaan yang mengkomodasi rantai produksi serta pemasaran dan memaksimalkan sumber daya dasar bagi pembangunan ekonomi desa. Pembinaan masyarakat akan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang secara mandiri, menciptakan lebih banyak peluang kerja, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyediaan produk juga jasa dalam negeri hinggannya akhirnya mengurangi

kebutuhan impor dari negara lain. (Nawangsari et al., 2021)

Pendapatan awal desa dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan berkembang atau tidaknya desa tersebut. Penanganan awal pendapatan desa dijalankan untuk mencapai pembangunan desa sebagai sumber pendapatan tambahan serta sumber keuntungan bagi pendapatan desa. Pendapatan asli desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 yang menjelaskan bahwa sumber “Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa”. Disisi lain sebuah bentuk keikutsertaan dalam penanganan serta kemajuan desa dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dasar hukum untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sebanyak 52.965 BUM Desa yang tersebar di Indonesia belum semua BUM Desa dikelola dengan baik dan terarah sehingga ada tumpang tindih antara BUM Desa satu dengan BUM Desa lainnya sehingga sering kali ditemukan banyak BUM Desa yang sudah berdiri bertahun-tahun tapi mengalami kegagalan dalam pengelolaannya, namun ada juga BUM Desa yang mengalami peningkatan dalam pengelolaannya menjadi BUM Desa yang sukses. Fenomena kegagalan pemerintah desa untuk mengetahui penyebab kegagalan dan mencari cara untuk memperbaiki hingga mengalami peningkatan dan mencapai target.

Berdasarkan sumber data yang diambil dari <https://BUMDesa.kemendes.go.id> Maret Tahun 2024 Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 52.965 BUM Desa. Berikut rincian data BUM Desa berdasarkan status prosesnya secara Nasional :

Tabel 1. 1 Jumlah BUM Desa Nasional Maret Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Mendaftar Nama	22
2.	Perbaikan Nama	1.121
3.	Terverifikasi Nama	26.954
4.	Mendaftar Badan Hukum	623
5.	Perbaikan Dokumen	6.374
6.	Sudah Berbadan Hukum	17.871
Total		52.965

Sumber : [https://BUM Desa.kemendesa.go.id](https://BUMDesa.kemendesa.go.id) diakses pada 27 maret 2024

Pemberdayaan masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan desa sangat diperlukan. Mengoptimalkan kapabilitas diri serta kemakmuran masyarakat guna pembangunan desa beserta memajukan pengetahuan, sikap, potensi, pemahaman serta mendayagunakan sumber daya dengan ketentuan kebijakan, program kegiatan serta pengawalan selaras berdasarkan tujuan awal kebutuhan masyarakat desa. Perihal ini merupakan usaha pemberdayaan yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk mengoptimalkan kemampuan serta perbaikan posisi tawar (Nawang Sari et al., 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikatakan menjadi institusi pendorong perekonomian lokal desa, sangatlah erat berkaitan terhadap implementasi kebijakan sebagai strategi pengembangan organisasi, dalam pengentasan kemiskinan di desa (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah bentuk organisasi perekonomian yang dimiliki pemerintah desa yang memiliki tujuan untuk mengelola serta mengembangkan potensi perekonomian desa dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai bentuk meningkatkan sumber daya serta kekayaan lokal dalam memajukan ekonomi serta kemakmuran rakyat.

Pemerintah desa perlu menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi

Badan Usah Milik Desa (BUM Desa) untuk berperan lebih baik dalam pembangunan ekonomi desa. Badan Usah Milik Desa (BUM Desa) juga dapat membantu perekonomian desa secara keseluruhan dengan mendorong pendapatan anggaran desa, yang memungkinkan pembangunan sarana prasarana desa serta meningkatkan tumbuhnya perekonomian masyarakat desa.

SuaraJatim.lid – Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tercatat ada sebanyak 6.080 yang telah terdaftar. Masuk dalam kategori maju. “Sebanyak 456 diantaranya masuk kategori maju, 2.270 berkembang dan 3.354 pemula,” ujar Kepala DPMD Jatim, Muhammad Yasin

Sumber : (<https://jatim.suara.com/read/2020/10/27/093012/dari-6080-BUM-Desa-di-seluruh-jatim-cuma-456-saja-dikategorikan-maju>, diakses November 2023)

Berdasarkan berita tersebut Provinsi Jawa Timur sendiri telah terbentuk 6.080 BUM Desa yang terdaftar dan 456 BUM Desa yang masuk kategori maju dan 2.270 sedang berkembang serta 3.354 dalam kategori pemula dengan total modal kerja 193,8 miliar dan telah memberikan kontribusi pada PAD sebesar 8,2 miliar. Kabupaten Nganjuk dengan berbagai potensi dan keragaman yang ada, mempunyai kemungkinan dalam pengembangan dan kemajuan Badan Usah Milik Desa (BUM Desa) yang cukup tinggi.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Nganjuk memiliki dukungan kuat dari pemerintah setempat. Hal ini ditinjau dari peningkatan total angka Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Nganjuk pada Maret Tahun 2024. Dibawah ini rekapan data jumlah Badan Usah Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 :

Tabel 1. 2 Jumlah BUM Desa Kabupaten Nganjuk Maret Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Mendaftar Nama	0
2.	Perbaikan Nama	1

No.	Keterangan	Jumlah
3.	Terverifikasi Nama	122
4.	Mendaftar Badan Hukum	2
5.	Perbaikan Dokumen	62
6.	Sudah Berbadan Hukum	77
Total		264

Sumber : [https://sc/BUM Desa diakses pada 27 maret 2024](https://sc/BUM_Desa_diakses_pada_27_maret_2024)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (bps.go.id), Kabupaten Nganjuk adalah satu diantara kabupaten yang terletak di Jawa Timur dengan total penduduk pada Tahun 2023 sejumlah 1.139.617 jiwa. Meliputi dari 20 kecamatan, 20 kelurahan dan 264 desa. Dengan jumlah BUM Desa yang terdata ada 264 unit. Dari data tersebut, diketahui bahwa ada 1 unit BUM Desa dalam proses perbaikan nama, 122 unit BUM Desa terverifikasi nama, 2 unit BUM Desa dalam mendaftar badan hukum, 62 unit BUM Desa dalam perbaikan dokumen dan 77 unit BUM Desa yang sudah berbadan hukum. Jumlah rincian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Nganjuk. yaitu :

Tabel 1. 3 Klasifikasi Total BUM Desa di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Total BUM Desa
1.	Lengkong	16 BUM Desa
2.	Jatikalen	11 BUM Desa
3.	Sawahan	8 BUM Desa
4.	Ngetos	9 BUM Desa
5.	Berbek	19 BUM Desa
6.	Loceret	22 BUM Desa
7.	Pace	18 BUM Desa
8.	Tanjunganom	14 BUM Desa
9.	Ngronggot	13 BUM Desa
10.	Kertosono	13 BUM Desa
11.	Patianrowo	11 BUM Desa
12.	Baron	11 BUM Desa
13.	Gondang	17 BUM Desa
14.	Sukomoro	10 BUM Desa
15.	Nganjuk	2 BUM Desa
16.	Bagor	19 BUM Desa
17.	Wilangan	7 BUM Desa
18.	Rejoso	24 BUM Desa
19.	Ngluyu	6 BUM Desa
20.	Prambon	14 BUM Desa

No	Kecamatan	Total BUM Desa
Total		264 BUM Desa

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/> , diakses pada 27 Maret 2024

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (bps.go.id) tahun 2023, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk memiliki total populasi sebanyak 73.668 orang. Kecamatan ini adalah yang mempunyai jumlah BUM Desa terbanyak di Kabupaten Nganjuk, dengan total 24 unit BUM Desa. Salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Rejoso yang memiliki keberhasilan dalam pengembangannya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Bernama “Langgeng Jaya”. Namun demikian, presentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Rejoso tetap di bawah rata-rata. Kecamatan Rejoso memiliki 24 unit BUM Desa dengan total 5 dengan status nama terverifikasi, 8 dengan status perbaikan dokumen badan hukum dan 11 unit BUM Desa dengan status dokumen badan hukum terverifikasi dan salah satu BUM Desa yang sudah berbadan hukum terverifikasi di Kecamatan Rejoso adalah BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol. Detail BUM Desa berdasarkan klasifikasi statusnya di Kecamatan Rejoso, sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Klasifikasi BUM Desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

No	Nama	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status
1.	BUM Desa Langgeng Jaya Gempol	Nganjuk	Rejoso	Gempol	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
2.	BUM Desa mungkung berdikari mungkung	Nganjuk	Rejoso	Mungkung	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
3.	BUM Desa tumpangsari setren	Nganjuk	Rejoso	Setren	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
4.	BUM Desa	Nganjuk	Rejoso	Sukorejo	Nama

No	Nama	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status
	mandiri sukorejo				Terverifikasi
6.	BUM Desa Bangkit Mandiri Mojorembun	Nganjuk	Rejoso	Mojorembun	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
7.	BUM Desa Mandiri Ngadiboyo	Nganjuk	Rejoso	Ngadiboyo	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
8.	BUM Desa bina mandiri rejoso	Nganjuk	Rejoso	Rejoso	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
9.	BUM Desa trubus klagen	Nganjuk	Rejoso	Klagen	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
10.	BUM Desa Jati Mulya Jatirejo	Nganjuk	Rejoso	Jatirejo	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
11.	BUM Desa Rukun Mulya Mlorah	Nganjuk	Rejoso	Mlorah	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
12.	BUM Desa Cipta Mandiri Puhkerep	Nganjuk	Rejoso	Puhkerep	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
13.	BUM Desa Mandiri Talun	Nganjuk	Rejoso	Talun	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
14.	BUM Desa Barokah Ngangkatan	Nganjuk	Rejoso	Ngangkatan	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
15.	BUM Desa Jasa Makmur Talang	Nganjuk	Rejoso	Talang	Nama Terverifikasi
16.	BUM Desa Banjar Sejahtera Banjarejo	Nganjuk	Rejoso	Banjarejo	Nama Terverifikasi
17.	BUM Desa Jati Semi Sambikerep	Nganjuk	Rejoso	Sambikerep	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi
18.	BUM Desa Rukun Makmur Musir Lor	Nganjuk	Rejoso	Musir Lor	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
19.	BUM Desa Makmur Sentosa Musir Kidul	Nganjuk	Rejoso	Musir Kidul	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
20.	BUM Desa Joso Mulyo	Nganjuk	Rejoso	Wengkal	Perbaikan Dokumen

No	Nama	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status
	Wengkal				Badan Hukum
21.	BUM Desa Mitra Sejahtera Jintel	Nganjuk	Rejoso	Jintel	Nama Terverifikasi
22.	BUM Desa Kedungmakmur Kedungpadang	Nganjuk	Rejoso	Kedungpadang	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
23.	BUM Desa Usaha Bersama Tritik	Nganjuk	Rejoso	Tritik	Perbaikan Dokumen Badan Hukum
24.	BUM Desa Gunung Jaya Bendoasri	Nganjuk	Rejoso	Bendoasri	Nama Terverifikasi

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/> , diakses pada November 2023

Menurut (bps.go.id) Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Gempol terletak di Kecamatan Rejoso memiliki jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebesar 2.391 jiwa. Merupakan salah satu desa yang sudah menorehkan banyak prestasi melalui BUM Desa. Desa Gempol memiliki BUM Desa Bernama Langgeng Jaya yang didirikan pada tahun 2015 dan dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Langgeng Jaya”. Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Gempol.

Portal Informasi Pemkab Nganjuk.- “Drs. Didik Eko Wahjudi selaku Kasi Administrasi Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. mengapresiasi setinggi-tingginya untuk BUM Desa Langgeng Jaya Gempol dalam waktu dua tahun ini sudah menunjukkan hasil yang bagus namun perlu ada beberapa perbaikan administrasi supaya lebih tertib administrasi dan akuntabel,”

(Dikutip dari sumber : <https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/peran-BUM-Desa-dalam-mendorong-perekonomian-di-desa>, diakses 2023).

Pernyataan langsung Drs. Didik Eko Wahjudi sebagai Kasi Administrasi

Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. Memaparkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya di Desa Gempol, telah berhasil mengurus usahanya dengan sangat baik serta berhasil mencapai keuntungan yang signifikan. Tahun 2022-2023. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, telah memperlihatkan hasil yang positif. Namun, diperlukan beberapa perbaikan dalam administrasi untuk meningkatkan keteraturan dan akuntabilitas. Meskipun begitu, BUM Desa di Desa Gempol terus berkembang, sedangkan saat ini banyak BUM Desa lain yang masih dalam tahap awal pembentukannya.

Kondisi awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya awal didirikan Tahun 2015 hingga Oktober Tahun 2019 bisa dikatakan vakum tidak ada dana yang dapat dikembangkan dan tidak ada program kerja yang berjalan sesuai mestinya. Peran pemerintah desa dalam mendorong program kerja pada saat itu juga dapat dikatakan sangat kurang karena pengembangan dana serta dana permodalan yang tidak ada dan tujuan dari pembentukan BUM Desa Langgeng Jaya tidak sesuai target dan harapan pada Peraturan Desa yang ada. Hingga akhirnya pada November Tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa “BUM Desa” Langgeng Jaya mulai aktif dan mengalami perkembangan yang signifikan yang didorong oleh peran pemerintah desa melalui penyertaan permodalan yang berasal dari penyertaan dana desa sebesar 20 juta. Dana tersebut dikelola untuk mengembangkan toko kelontong. Pada tahun berjalan tahun 2020 semakin mengalami perkembangan dalam mengelola toko kelontong berasal dari dana desa sebesar 20 juta. Dan tahun 2021 sebesar 10 juta berasal dari dana desa. Dan pada tahun 2022 mendapat bantuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi

sebesar 75 juta dengan rincian 72 juta sebagai pengembangan BUM Desa Langgeng Jaya dan 3 juta sebagai operasional desa.

Kabarjagad, Nganjuk – Pemerintah Desa (Pemdes) Gempol, Kecamatan Rejoso meresmikan gedung baru yang nantinya akan digunakan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya, Sabtu (26/02/2022). Usai memiliki gedung baru, Pemdes Gempol berharap BUM Desa Langgeng Jaya bisa semakin maju dan berkembang. Terutama untuk mendogkrak kesejahteraan warga setempat.
(Dikutip dari sumber : <https://www.kabarjagad.id/jatim/pemdes-gempol-majukan-BUM-Desa-langgeng-jaya-dengan-gedung-baru/>) diakses 2023

Berita diatas menjelaskan bahwasannya keberhasilan BUM Desa Langgeng Jaya dalam mengoptimalkan perannya dengan menorehkan keuntungan dana pemasukan yang signifikan dari pengembangan permodalan usaha toko kelontong dan program kerja lainnya mampu membuat BUM Desa Langgeng Jaya serta Pemerintah Desa Gempol untuk membangun serta meresmikan gedung baru yang digunakan sebagai lokasi baru BUM Desa Langgeng Jaya. Dan mulai beroperasi aktif di gedung baru pada Februari tahun 2022. Agar kedepannya BUM Desa Langgeng Jaya diharapkan mampu semakin maju serta berkembang dari tahun sebelumnya serta berhasil membuat Desa Gempol untuk menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara pendahuluan dengan Direktur BUM Desa “Langgeng Jaya” Ibu Warjiyem. Pada 25 Januari 2024

“Bahwa BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol Kabupaten Nganjuk telah berkontribusi dalam pengembangan unit usaha, BUM Desa Langgeng Jaya telah berkontribusi dalam APBDes dimana tahun anggaran 2019 memberikan kontribusi sebesar Rp 1,2 juta serta APBDes tahun anggaran 2020 sejumlah Rp 2,725 juta yang dibelikan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat janda serta duda Desa Gempol. tahun 2021 sebesar Rp. 1,687.500,00. Tahun 2022 sebesar Rp. 2,784,822,00. Dan tahun 2023 sebesar Rp. 2,488,812,00.

Berkembangnya BUM Desa Langgeng Jaya terbukti dengan adanya pengembangan yang sukses dijalankan yang akhirnya banyak program dan sektor unit baru. 1). Program Lumbung Pangan Tani Makmur, 2). Kelompok Tani (Poktan), 3). Sewa Alat Pompa atau Diesel, 4). Jasa Keuangan, 5). Toko BUM Desa Langgeng Jaya, 6). Himpunan petani pemakai air (HIPPA). Dan program kerja sama dengan pihak swasta adalah salah satu pendekatan program pengembangan yang sedang dijalankan oleh BUM Desa Langgeng Jaya. Melalui kerja sama kemitraan dengan pihak swasta nantinya diharapkan BUM Desa Langgeng Jaya semakin dikenal lebih luas serta mendapatkan imbal balik yang positif. Selain itu adapun program kerja baru yang akan berjalan kedepannya yaitu kolam pancing ikan yang dibangun bersamaan dengan warung-warung kopi guna meningkatkan penghasilan BUM Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan diatas, selain keberhasilannya dalam pengembangan permodalan yang dilakukan hingga terlibat langsung dalam sumbangsih APBDes tiap tahunnya. Pertumbuhan BUM Desa Langgeng Jaya terbukti dari keberhasilan pengembangan usahanya, yang kemudian menghasilkan banyak program baru dan unit sektor yang berkembang. Hingga saat ini BUM Desa Langgeng Jaya memiliki enam program kerja unggulan yang meliputi mencakup: 1) Program lumbung pangan tani makmur yang fokus pada usaha simpan pinjam gabah, melibatkan 300 kepala keluarga. 2) Kelompok tani (Poktan) yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam pupuk, dengan tiga Poktan aktif di Desa Gempol, yaitu Poktan Gemah Ripah, Poktan Sumber Makmur 1, dan Poktan Sumber Makmur. 3) Layanan penyewaan alat pompa air atau diesel untuk pengairan sawah, dengan delapan unit alat pompa air yang secara teratur disewa oleh petani lokal. 4) Layanan jasa keuangan yang melibatkan ketua RT dan RW serta masyarakat setempat. 5) Toko BUM Desa Langgeng Jaya, untuk menyediakan kebutuhan pokok serta pangan lainnya, memperluas akses dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan mengurangi kebutuhan mereka untuk berpergian jauh dalam

memenuhi kebutuhan pangan. 6) Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) Tirta Langgeng, dengan keanggotaan sebanyak 321 orang.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara pendahuluan dengan Direktur BUM Desa “Langgeng Jaya” Ibu Warjiyem pada 25 Januari 2024.

“Dikatakan bahwa keberhasilan pengembangan permodalan dan usaha yang dilakukan BUM Desa Langgeng Jaya berbanding terbalik dengan kondisi pengembangan SDM yang ada di desa tersebut. Pengembangan SDM di desa Gempol bisa dikatakan kurang berkembang dimana belum adanya program pelatihan dalam mengembangkan kemampuan minat dan potensi masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk unggulan dan kreativitas dari masyarakat desa gempol. Meningkatkan pengembangan SDM dalam bidang kewirausahaan juga sangat diperlukan melihat masyarakat desa gempol sangat berpotensi untuk dapat menghasilkan produk unggulan dari hasil pertanian yang dapat menjadi target dalam pengembangan SDM masyarakat dan menjadi ikon dari usaha BUM Desa dalam ranah pemberdayaan masyarakatnya. Melihat keikutsertaan pemerintah desa dalam membangun potensi masyarakat dalam pengembangan SDM bisa dikatakan kurang maksimal, fasilitas pemberian penyuluhan untuk menarik minat masyarakat juga belum maksimal sehingga pengembangan SDM di desa gempol bisa dikatakan tidak memenuhi target pemberdayaan masyarakat. Partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa Langgeng Jaya dalam menjembatani mengenai fungsi BUM Desa sebagai kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan cukup maksimal, namun masih diperlukannya perencanaan kolaboratif dalam membuat intensifikasi produk BUM Desa guna memaksimalkan potensi desa gempol. Karena BUM Desa bukan sebagai manajemen bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan bisnis tetapi juga memperhatikan keselarasan sosial, dan pengelolaannya perlu pengaturan dan sinkronisasi antara bisnis dan masalah sosial. Dalam hal ini bentuk dukungan dari kepemimpinan transformasional sangat diperlukan untuk meningkatkan peranan serta optimalisasi BUM Desa Langgeng Jaya.”
(Hasil wawancara pendahuluan 25 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan diatas diketahui bahwa pengembangan SDM yang ada di Desa Gempol kurang maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik. Melihat potensi hasil panen masyarakat Desa Gempol cukup dilirik oleh pihak luar, namun pemenuhan program pelatihan dalam

menunjang bentuk kreativitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan untuk menghasilkan produk unggulan juga belum dapat terealisasi dengan nyata. Bentuk keterlibatan pemangku kepentingan BUM Desa Langgeng Jaya dalam menjembatani mengenai fungsi BUM Desa sebagai kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai bentuk awal perencanaan kolaboratif dalam membuat intensifikasi produk BUM Desa memaksimalkan potensi Desa Gempol.

Di sisi lain, BUM Desa Langgeng Jaya juga mengembangkan diri melalui pengembangan jejaring pemasaran, yang merupakan inovasi terbaru dalam pengembangan usaha, baik secara independen maupun dengan bermitra dengan organisasi lainnya. Sebagian dari inisiatif pengembangan yang tengah dilakukan yakni program kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak, contohnya melalui kerjasama dengan Toko Elektronik (Mega Elektronik) di Kabupaten Nganjuk. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sekunder.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara pendahuluan dengan Direktur BUM Desa “Langgeng Jaya” Ibu Warjiyem pada 25 Januari 2024.

“Kedepannya ya mas, nanti akan bekerja sama dengan pihak perbankan, misal BRILink agar nantinya masyarakat mudah untuk pembayaran online dan pembayaran lainnya. Jadi tidak jauh-jauh untuk pergi, disini juga bisa” (Hasil wawancara pendahuluan 25 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan diatas diketahui jika pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Gempol. BUM Desa Langgeng Jaya kedepannya akan mengembangkan unit usaha bisnis dengan menjalin kemitraan bersama pihak Bank milik pemerintah untuk melayani *E-Payment* serta

pembayaran lainnya. Situasi ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap masyarakat Desa Gempol, karena mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pembayaran. Dalam konteks ini, BUM Desa Langgeng Jaya sukses mendapatkan reputasi yang luas dan mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Portal Informasi Pemkab Nganjuk.- NGANJUK, PING - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas PMD Nganjuk, Tri Wahyu Kuntjoro, S.Sos., M.M telah mengumumkan hasil dari Lomba BUM Desa tingkat Kabupaten Nganjuk yang telah dilakukan evaluasi tinjau lapang pada Maret 2022. Berdasarkan penilaian oleh tim penilai disampaikan bahwa peraih Juara I Lomba BUM Desa se Kabupaten Nganjuk adalah BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol-Rejoso dengan skor 87.

(Dikutip dari sumber : [https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/BUM Desa-langgeng-jaya-desa-gempol-raih-juara-i-lomba-BUM Desa-tingkat-kabupaten-nganjuk](https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/BUM%20Desa-langgeng-jaya-desa-gempol-raih-juara-i-lomba-BUM%20Desa-tingkat-kabupaten-nganjuk)) diakses 2023.

Berita diatas menjelaskan BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol Kabupaten Nganjuk juga pernah mengikuti lomba BUM Desa se Kabupaten Nganjuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan memperoleh juara 1 pada tahun 2022. Dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 87, BUM Desa Langgeng Jaya berhasil mengungguli BUM Desa lainnya seperti BUM Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur-Lengkong yang menduduki posisi kedua dengan nilai 85,5, dan BUM Desa Pandanwangi Desa Pandantoyo-Kertosono yang meraih peringkat ketiga dengan nilai 75. Keberhasilan ini menjadikan BUM Desa Langgeng Jaya sebagai perwakilan resmi Kabupaten Nganjuk dalam kompetisi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikatakan Keberhasilan BUM Desa Langgeng Jaya dalam pengembangannya telah menegaskan eksistensinya,

membuatnya semakin maju dan sukses. Keberhasilan BUM Desa Langgeng Jaya juga dapat dicapai berkat pengembangan yang telah diterapkan dengan baik. Program-program yang dijalankan oleh BUM Desa tersebut memiliki dampak yang cukup berarti terhadap kemajuan organisasi, sehingga menghasilkan kesuksesan yang diinginkan.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mendorong BUM Desa Langgeng Jaya di Desa Gempol, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, mencapai prestasi yang luar biasa ini. Inilah yang mendorong minat peneliti untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul **“Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya Di Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya Di Desa Gempol Kabupaten Nganjuk ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya Di Desa Gempol Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Langgeng Jaya di Desa Gempol Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang terkait dengan pengembangan BUM Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

- a) Peneliti melaksanakan penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Administrasi Publik, yang terletak di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- b) Dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang BUM Desa berkelanjutan melalui BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, serta sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.

2) Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi atau literatur kepustakaan yang dapat menjadi acuan untuk penelitian

3) Bagi BUM Desa Langgeng Jaya Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai masukan, manfaat serta evaluasi dalam pengembangan sebagai strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan BUM Desa Langgeng Jaya di Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.